

RINGKASAN

Kasus *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dinilai sulit untuk ditangani karena dapat menghambat terciptanya generasi muda yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktif yang dapat menunjang kesuksesan pembangunan bangsa karena melambatnya pertumbuhan mental, serta berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kematian. Guna mencegah permasalahan tersebut, setiap bidan memiliki peran yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan anak yang diberikan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah serta pemberian konseling dan penyuluhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pencegahan *stunting* di Puskesmas I Cilongok Kabupaten Banyumas.

Implementasi menjadi unsur penting dalam pembuatan kebijakan publik karena dapat melihat tercapai atau tidaknya hasil yang diinginkan dari terbentuknya suatu kebijakan publik yang sudah direncanakan dan disahkan. Untuk mengkaji sebuah implementasi, keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III sangat bergantung pada kesesuaian variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pada aspek komunikasi, kegiatan sosialisai dan penyuluhan telah dilakukan di Puskesmas I Cilongok. Sumber daya manusia sudah dikatakan cukup namun tidak dapat digunakan secara maksimal karena tidak adanya tim khusus program pencegahan stunting, sumber daya finansial terbilang cukup untuk mendanai seluruh kegiatan program, serta sumber daya fisik masih kurang lengkap dan kurang memadai. Pada aspek disposisi, sikap implementor program dilakukan dalam bentuk komitmen dan pemberian bantuan berupa PMT. Pada aspek struktur birokrasi, program pencegahan stunting telah diatur secara jelas berdasarkan SOP yang ada. Pengawasan dan evaluasi telah dilakukan oleh Puskesmas I Cilongok setelah pelaksanaan program guna menghindari kemungkinan adanya penyimpangan dan meningkatkan mutu dan kinerja program serta menelaah setiap hasil yang direncanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas I Cilongok masih kurang efektif dan optimal karena dengan tujuan mengurangi angka stunting sampai dibawah ketetapan WHO masih belum tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Puskesmas, Desa, Stunting

SUMMARY

Stunting is one of the nutritional problems that is considered difficult to handle because it can obstruct the creation of a healthy, intelligent, creative, and productive young generation that can support the success of national development due to slowing mental growth, and is associated with an increased risk of death. In order to prevent these problems, every medical staff has a role that is contained in the Regulation of the Minister of Health Number 28 of 2017 article 11 paragraph 1 which states that child health services are provided for newborns, infants, toddlers, and preschool children as well as providing counseling. The purpose of this research is to find out how the implementation of the stunting prevention program at Puskesmas I Cilongok, Banyumas Regency.

Implementation is an important element in making public policy because it can see whether or not the desired results are achieved from the formation of a public policy that has been planned and ratified. The success of policy implementation according to Edward III is strongly influenced by the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The method used in this research is descriptive qualitative. Selection of informants using purposive sampling technique. Collecting data using interviews, observations, and documentation studies. The results of this research indicate that in the communication aspect, socialization and counseling activities have been implemented at Puskesmas I Cilongok and each village. Human resources are said to be sufficient but cannot be used optimally because there is no special team for stunting prevention programs, financial resources are quite sufficient to fund all program activities, and physical resources are still incomplete and inadequate. In the disposition aspect, the attitude of the program implementer is carried out in the form of commitment and the provision of assistance in the form of PMT. Then on the aspect of bureaucratic structure, the Stunting Prevention Implementation program has been clearly regulated based on available technical instructions and SOPs. Supervision and evaluation have been carried out by Puskesmas I Cilongok after program implementation in order to avoid possible deviations and improve program quality and performance as well as review each planned outcome.

The conclusion of this research is that the implementation of the Stunting Prevention Program at Puskesmas I Cilongok is less effective because with the aim of reducing the stunting rate to below the WHO stipulation, it has not been achieved optimally.

Keywords: Policy Implementation, Puskesmas, Village, Stunting